

BAB III
KEBIJAKAN POLITIK KOREA SELATAN DALAM PENYELESAIAN
KRISIS NUKLIR SEMENANJUNG KOREA 2002

A. Sejarah Politik Kontemporer Republik Korea

Kekalahan Jepang dalam perang dunia II membawa perubahan yang sangat berarti di Semenanjung Korea. Perjuangan rakyat Korea untuk merebut kemerdekaan akhirnya tidak sia-sia setelah Jepang menyerahkan kekuasaannya bagi kemerdekaan Korea dan menarik tentaranya dari Semenanjung Korea. Sepeninggal Jepang kekuatan dua negara adikuasa yaitu dunia Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai menyebarkan pengaruhnya di daratan Semenanjung Korea. Usaha Korea untuk membentuk pemerintahan yang independen harus terhalang perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kekuatan dua negara adikuasa ini terwujud dalam kekuatan militer, tentara Amerika Serikat menduduki separuh wilayah Semenanjung sebelah selatan dan militer Uni Soviet menguasai wilayah utara.

Di bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa menggunakan resolusi yang menghendaki adanya pemilihan umum di Korea di bawah pengawasan PBB. Akan tetapi resolusi itu ditolak dan tidak dipatuhi oleh Uni Soviet, langkah itu lalu dilanjutkan dengan meniadakan semua akses bagi komisi PBB untuk memasuki wilayah Korea bagian utara yang diduduki oleh tentara Uni Soviet. Majelis Umum PBB dengan menggunakan resolusi yang lain kemudian menghendaki diadakannya pemilihan umum di semua wilayah Korea yang mudah untuk didatangi komisi PBB, dan daerah itu adalah daerah Semenanjung Korea bagian selatan yang diduduki oleh tentara Amerika Serikat.

Pemilu pertama di Korea diselenggarakan pada tanggal 10 Mei 1948. Pada pemilu perdana yang diprakarsai PBB ini Syngman Rhee terpilih sebagai presiden pertama Republik Korea (*Republic of Korea*). Sedangkan di Korea bagian utara rezim komunis didirikan di bawah pemerintahan Kim Ill Sung dengan nama negara Republik Rakyat Demokrasi Korea (*Democratic People Republic of Korea*).

1. Masa Pemerintahan Republik Pertama

Dimasa pemerintahan Syngman Rhee kebijakan dijalankan dengan sangat terpusat. Masa pemerintahan transisi ini memcatatkan sejarah tersendiri bagi Korea Selatan, yaitu terjadi Perang Korea di tahun 1950 hingga tahun 1953. Dalam perang Korea ini banyak jatuh korban, karena banyak terjadi korban dari rakyat Korea (baik militer maupun sipil) kalangan akademisi yang diwakili oleh mahasiswa menggerakkan pemberontakan terhadap kebijakan pemerintah. Pemberontakan yang semakin merebak ini membuat Syngman Rhee meletakkan jabatannya sebagai presiden di bulan April 1960 dan menyerahkan kepemimpinan negara pada Ho Chong, menteri luar negeri Korea.

2. Masa Pemerintahan Republik Kedua

Pemerintahan Ho Chong segera menyusun rancangan Undang Undang Dasar baru yang mengatur pembentukan parlemen dua kamar. Dengan sistem baru ini kekuasaan terpusat pada Perdana Menteri dan kabinetnya yang bertanggung jawab kepada DPR. Presiden akan dipilih dalam pemilihan tidak langsung oleh DPR. Sedangkan presiden hanya berhak untuk mengusulkan calon Perdana Menteri. UUD baru itu dilaksanakan untuk menyelenggarakan pemilihan umum pada tanggal 29 Juli 1960 setelah sebelumnya diumumkan pada tanggal 15 Juni 1960. Dalam pemilihan ini Partai Demokrat memenangkan suara mayoritas dalam kedua lembaga DPR. DPR kemudian menunjuk Yu Po-Sun sebagai presiden dan menyetujui pilihan presiden terpilih Yu Po-Sun yang memilih Chang Myon menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri. Masa pemerintahan P.M Chang Myon bisa dibilang sangat singkat, karena belum genap berusia satu tahun pemerintahan P.M Chang Myong harus diturunkan dari kekuasaannya oleh sebuah kudeta militer yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Park Chung-hee.

Ada beberapa alasan yang mendorong militer melakukan kudeta, beberapa alasan tersebut adalah¹

1. Adanya perpecahan di dalam tubuh partai berkuasa (partai Demokrat). Perpecahan partai ke dalam dua fraksi telah menimbulkan pertentangan di dalam pemerintahan sehingga menghambat pelaksanaan kebijakan jangka panjang.
2. Pemerintahan baru gagal melakukan reformasi politik secara cepat. Sebagai pemerintah yang terpilih di tengah bergolaknya gerakan revolusi Perdana Menteri Chang Myon dinilai terlalu lambat dalam menangani masalah kekacauan politik sehingga pihak militer merasa perlu mengambil alih kepemimpinan agar dapat segera membenahi situasi politik dalam negeri Korea.
3. Kebijakan pemerintah yang mendevaluasi mata uang Korea. Kebijakan ini menimbulkan kepanikan massa dan para pengusaha.
4. Perpecahan di kalangan masyarakat antara pihak yang menginginkan kembali pemerintahan Syngman Rhee dan pihak yang menginginkan perubahan kehidupan politik ke arah demokrasi.

3. Masa Pemerintahan Republik Ketiga

Dengan posisi jabatan sebagai Ketua Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional Jenderal Park Chung-Hee mengambil alih fungsi lembaga negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintah. Setelah dua tahun pemerintahan di bawah Dewan Rekonstruksi Nasional, pemilu kemudian digelar di tahun 1963 dan terpilihlah Park Chung-Hee sebagai presiden.

Untuk menciptakan basis pemerintahannya, Park Chung-Hee membentuk Partai Republik Demokrat. Setelah pemerintahan di bawah kekuasaan presiden Park, laju industrialisasi meningkat dengan pesat dan dengan cepat merubah tingkat perekonomian Korea Selatan semakin naik. Akan tetapi, untuk dapat meningkatkan laju perekonomian ini presiden Park harus membatasi dengan ketat akan hak-hak politik dan kebebasan sipil rakyat Korea Selatan.

¹Yang Seung-Yoon.*Op.cit.*, hal 196

Pembangunan politik masyarakat tidak dapat berkembang pada masa pemerintahan Park Chung-Hee. Strategi yang dijalankan oleh Park tidak selamanya mendatangkan hasil yang baik bagi kekuasaannya. Pembatasan terhadap aspirasi politik rakyat telah membuat bergabungnya kembali dua faksi partai Demokrat yang terpisah di masa pemerintahan P.M Chang Myon dan membentuk Partai Demokrat Baru (PDB) dibawah kepemimpinan Kim Young Sam dan Kim Dae-Jung. Dengan hadirnya partai baru ini menjadikan tekanan dari dalam negeri terhadap pemerintah berkuasa semakin meningkat, tekanan terhadap pemerintahan presiden Park itu juga menjadi semakin luas hingga ke dunia internasional. Tekanan yang semakin besar ini menyebabkan Park Chung-Hee mengumumkan keadaan darurat pada desember 1970. Dengan adanya keadaan darurat ini otomatis aktifitas politik di luar aktifitas pemerintah dilarang. UUD ditunda dan DPR serta partai politik dibubarkan. Park Chung-Hee kembali terpilih dalam pemilu tahun 1971 setelah harus bersaing ketat dengan Kim Dae-Jung yang mewakili Partai Demokrat Baru (PDB). PDB mampu mengantongi 45 persen total perolehan suara.

Langkah politik presiden Park berikutnya adalah mengumumkan serangkaian reformasi *Yusin*. Dengan reformasi *Yusin* ini presiden Park mencoba untuk membuat wewenang seorang presiden menjadi semakin luas. Dalam reformasi *Yusin* ini, presiden dipilih secara tidak langsung oleh Dewan Unifikasi Nasional. Dewan ini dibentuk khusus untuk memilih presiden. Presiden diberi kewenangan untuk menunjuk sepertiga anggota DPR. Sistem *Yusin* ini banyak ditentang oleh banyak kalangan di Korea Selatan, termasuk juga para mahasiswa dengan diwujudkan dalam gerakan mahasiswa yang mencapai puncaknya pada tahun 1979. Kebijakan yang bersifat otoriter ini tidak hanya ditentang oleh pihak pihak di luar pemerintahan saja, akan tetapi juga ditentang oleh badan badan yang masih di bawah garis komando presiden Park yang bertanggung jawab terhadap situasi keamanan Korea Selatan, diantaranya oleh Kim Jae-Kyu. Kim Jae-Kyu sebagai direktur Badan Intelijen Pusat Korea menentang kebijakan presiden Park yang sangat otoriter dan tidak aspiratif, kebijakan ini dianggap dapat memperburuk situasi

keamanan dalam negeri Korea Selatan. Di saat pertentangan. Kim Jae-Kyu menyarankan agar pemerintah mulai melakukan kompromi dan reformasi, akan tetapi presiden Park Chung-Hee tetap menyatakan akan menggunakan kekerasan dalam menghadapi kekerasan para demonstran. Pertentangan ini mendorong Kim Jae-Kyu untuk membunuh Park Chung-Hee dan Cha Chi-Chol, Kepala pengawal Park Chung-Hee di suatu acara yang diselenggarakan oleh Badan Intelijen Pusat Korea.² Kematian Park ini membawa situasi negara dalam masa transisi di bawah darurat perang. Korea Selatan kemudian mengangkat Choi Kyu-Hah sebagai presiden sementara Korea Selatan. Komitmen Choi Kyu-Hah untuk tetap menjalankan sistem *Yusin* menimbulkan keraguan dalam diri masyarakat Korea Selatan. Ketidakmampuan presiden Choi untuk bertindak secara cepat dalam memperbaiki UUD kembali menimbulkan gejolak di masyarakat.

4. Masa Pemerintahan Republik Kelima

Langkah Mayor Jenderal Chun Doo-Hwan untuk menguasai pemerintahan pada dasarnya terdiri dari dua langkah utama yang dilakukan. Langkah pertama Chun Doo-hwan adalah menguasai dan melumpuhkan kekuatan militer yang masih loyal kepada pemerintahan sebelumnya.

Bersama dengan Mayor Jenderal Roh Tae-Woo dan Mayor Jenderal Chong Ho-Yong, Mayor Jenderal Chun Doo-hwan mulai memenjarakan beberapa tokoh kunci militer atas tuduhan terlibat dalam pembunuhan Park Chung-Hee seperti Jenderal Chong Sung-Hwa (Kepala staf militer dan penanggung jawab UU Darurat Perang) dan Komandan Batalyon Ibukota dan Komando Pasukan Khusus. Setelah melakukan penahanan tank tank pertahanan Korea dikirim untuk menjaga keamanan Ibukota Seoul dari kemungkinan pemberontakan militer yang masih loyal terhadap pemerintahan terdahulu. Setelah itu langkah selanjutnya Chun meletakkan orang-orang pilihannya menggantikan para tokoh yang telah dipenjarakan. Letnan Jenderal Yi Hui-Song ditunjuk untuk menggantikan Chong Sung-Hwa sedangkan Roh Tae-Woo ditunjuk sebagai kepala Komando Batalyon Ibukota, dan Chong Ho-Yong ditunjuk sebagai Komando Pasukan Khusus.

²Yang Seung-Yoon.*Op.cit.*, hal 200

Setelah kekuatan militer dikuasai penuh, langkah kedua Chun Doo-Hwan kemudian mencoba menguasai negara dan masyarakat Korea. Tindakan nyatanya adalah dengan mengambil alih kepemimpinan Badan Intelijen Pusat Korea secara ilegal dengan kekuatan militer yang sepenuhnya telah mendukungnya. Tindakan Chun Doo-Hwan ini mendapatkan tentangan dari kalangan pelajar dan mahasiswa Korea. Aksi tersebut dijawab oleh Chun Doo-wan dengan mengeluarkan UU Darurat Perang di berbagai daerah.

Langkah selanjutnya dari Chun Doo-Hwan adalah membentuk Komite Sipil-Militer yang khusus menangani masalah-masalah keamanan nasional pada tanggal 31 Mei 1980. Di bulan Agustus 1980 Choi Kyu-Hah mengundurkan diri dari jabatan presidennya. Dan di akhir bulan Agustus 1980, Chun Doo-Hwan yang mundur dari jabatan militernya terpilih untuk menggantikan Choi sebagai presiden Korea Selatan. Untuk pertama kalinya Chun Doo-Hwan menjadi presiden tidak melalui proses pemilihan umum melainkan dipilih oleh Kongres Nasional untuk Unifikasi dengan didukung oleh kedekatannya kepada kalangan pejabat Korea Selatan dan kepemimpinannya dalam tubuh militer.

Terpilihnya Chun-Doo-Hwan dalam pemilu sekaligus mengakhiri masa transisi yang telah berjalan selama tiga tahun (1978 - 1981). Masa transisi ini dijalankan oleh Chun Doo-Hwan dengan mengikuti pola yang sama dengan pola yang dipakai Park Chung-Hee selama masa transisinya (1961 - 1963).

Kesetiaan anggota militer dipertahankan oleh Chun dengan memberikan promosi kenaikan pangkat dan semua bentuk ancaman terhadap kepemimpinan Chun ditangani dengan kekerasan. Seperti Park, Chun Doo-Hwan meletakkan legitimasi bagi pemerintahannya dengan memberantas korupsi dan menjanjikan kepada rakyat Korea akan adanya suatu tatanan baru pertumbuhan ekonomi dan keadilan bagi masyarakatnya. Presiden Chun juga menggunakan janjinya itu untuk membungkam kegiatan politik tokoh-tokoh politik sipil diantaranya Kim Jong-Pil, Kim Young-Sam, dan Kim Dae-Jung.

5. Masa Pemerintahan Republik Keenam

Pada tanggal 29 Juni 1987, setelah dipilih menjadi kandidat Presiden pengganti Chun Doo-Hwan, Roh Tae Woo mengeluarkan delapan program reformasi yang meliputi pelaksanaan pemilihan presiden secara langsung dan pemilihan hak-hak sipil bagi tahanan politik, perlindungan terhadap hak asasi manusia, penghapusan pembatasan pers, peningkatan otonomi pemerintahan lokal dan lembaga pendidikan dan pengakuan terhadap partai politik.

UUD baru disahkan pada tanggal 17 Oktober 1987 dan mengatur mengenai pemilihan Presiden secara langsung. Pemilu dijadwalkan untuk diselenggarakan pada tanggal 16 Desember 1987. Roh Tae Woo berhasil memenangkan pemilu dengan memperoleh suara 37 persen dikarenakan pecahnya suara di kubu oposisi antara Kim Young-Sam dan Kim Dae-Jung. Sesuai dengan UUD, masa jabatan Roh Tae Woo dibatasi hanya satu kali untuk lima tahun masa jabatan. Wewenang presiden juga dikurangi sehingga presiden tidak dapat lagi membubarkan DPR. Disisi lain DPR memiliki wewenang untuk mengawasi urusan negara dan menyetujui ketua mahkamah agung yang diajukan oleh presiden.

Di masa pemerintahan ini persiapan untuk kembali menyelenggarakan Pemilihan umum sipil dicetuskan dan direncanakan. Sepanjang masa pemerintahan Roh Tae-woo ini rencana dan persiapan menyelenggarakan pemilihan umum sipil adalah sebuah prestasi politik tersendiri sejak tiga puluh dua tahun Republik Korea merdeka.

6. Masa Pemerintahan Republik Ketujuh

Pada tahun 1992 pemilihan umum akhirnya berhasil digelar setelah melalui persiapan yang cukup panjang di masa pemerintah Roh Tae-woo. Dalam pemilihan umum ini Kim Young Sam terpilih menjadi presiden. Kim Young Sam adalah berasal dari kalangan sipil dan seorang aktifis pro-demokrasi. Di masa pemerintahan ini juga berhasil disusun sebuah konsep reunifikasi yang disusun dengan berdasarkan pada kebijakan pemerintahan sipil yang lebih demokratis.

Prioritas agenda politik yang paling diutamakan di masa Kim Young Sam ini adalah pemberantasan korupsi dengan menjalankan reformasi politik

di dalam tubuh pemerintahannya. Reformasi politik ini diwujudkan dengan mencoba untuk menciptakan pemerintahan yang bersih korupsi dan konspirasi. Bukan hanya di dalam pemerintah bentukannya saja, pemerintahan sipil Kim juga melakukan perubahan di dalam tubuh militer. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk menciptakan struktur militer yang bebas dari konspirasi dan mampu mendukung jalannya pemerintahan secara maksimal. Langkah langkah yang diambil dalam mengatur kembali militer adalah antara lain dengan mengganti kepala staf dan komandan pertahanan keamanan, membongkar tradisi dengan menunjuk seorang jenderal yang tidak berbintang empat menjadi menteri pertahanan, dan memecat beberapa jenderal senior dari angkatan bersenjata. Langkah yang lainnya adalah upaya presiden Kim untuk menghancurkan masyarakat rahasia yang sangat berpengaruh yang menamakan diri sebagai *Hanaboe* (atau biasa disebut sebagai *One Mind Society*, adalah sebuah persaudaraan dari elit jenderal yang telah lulus dari akademi militer), dan juga menggantikan brigade militer yang menjaga Gedung Biru dengan polisi sipil.³

7. Masa Pemerintahan Republik Kedelapan

Di tahun 1997 pemilu yang telah di agendakan di masa pemerintahan Kim Young Sam dilaksanakan dan memilih Kim Dae-Jung sebagai presiden. Kim Dae-Jung ini adalah pemimpin oposisi utama Kongres Nasional untuk Politik Baru di masa pemerintahan sebelumnya. Untuk pertama kali dalam sejarah konstitusi Korea Selatan, pembentukan pemerintahan dibuat melalui peralihan kekuasaan secara damai dari pihak partai berkuasa kepada partai oposisi.

Di masa pemerintahan Kim Dae-Jung hubungan antar Korea Utara dan Korea Selatan mencapai puncaknya. Prestasi di masa pemerintahan ini adalah mampu menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi Inter-Korea. Dari pertemuan bersejarah ini, banyak sekali perkembangan hubungan antara kedua Korea.

³Carolina G. Hernandez, *Hubungan Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2000, hal 113 51

Yang telah terwujud nyata adalah pertemuan kembali keluarga yang terpisah dan mengembangkan lebih jauh kerjasama di bidang ekonomi.

8. Masa Pemerintahan Republik Kesembilan

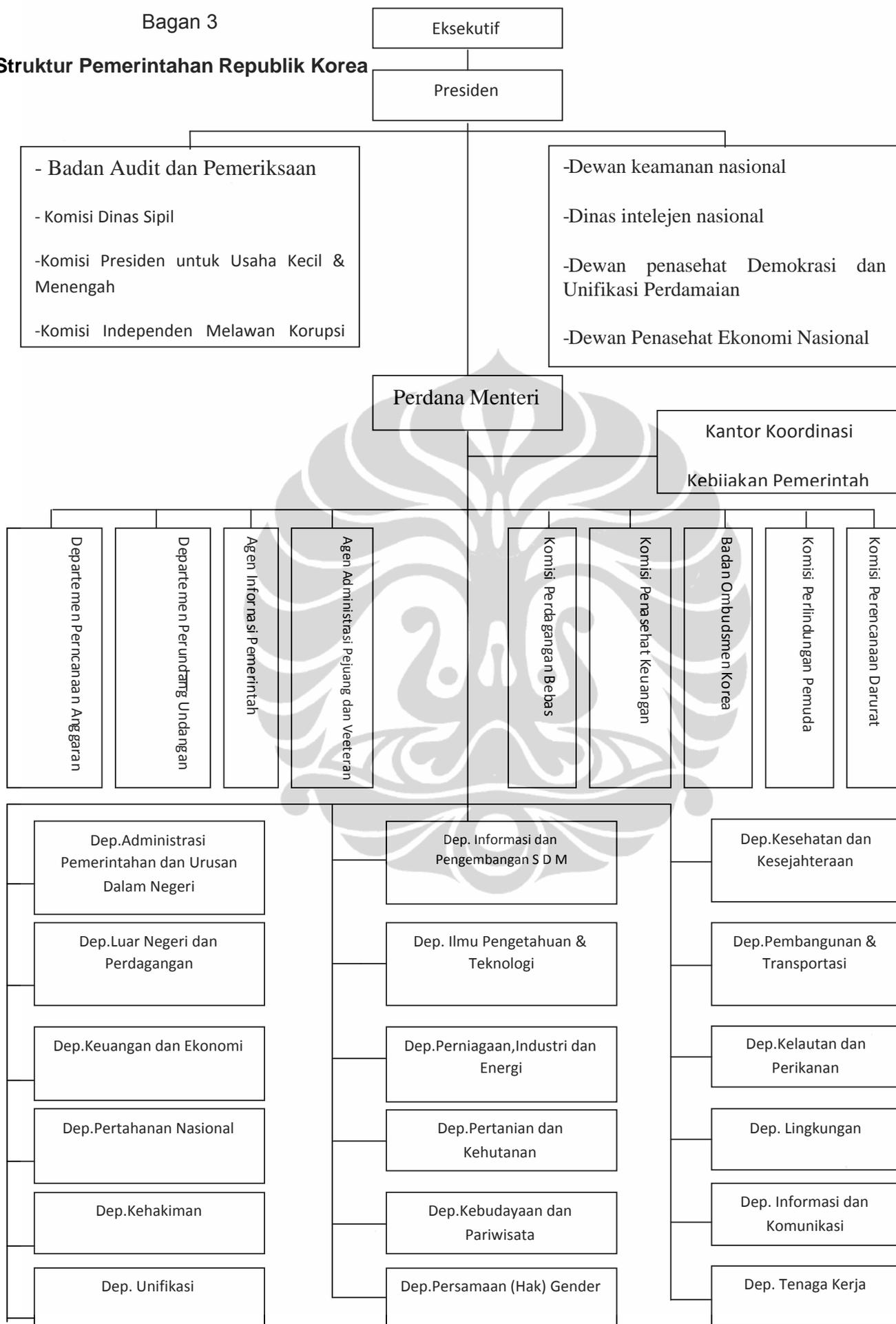
Di tahun 2002 Roh Moo-Hyun terpilih menggantikan Kim Dae-Jung dalam pemilu 2002. Pemerintahan mulai berjalan dan melaksanakan tugasnya mulai tanggal 2 Februari 2003.

Pemerintahan yang menamakan diri "Pemerintahan Partisipasi" ini menetapkan tiga sasaran dan cita - cita, yaitu berdemokrasi bersama rakyat, masyarakat dengan pertumbuhan seimbang, dan perdamaian dan kemakmuran di kawasan Asia Timur Laut.

Di masa pemerintahan Roh Moo-Hyun aspirasi rakyat diakomodir oleh pemerintah dengan lebih serius. Upaya menjawab aspirasi masyarakat ini diwujudkan dalam kabinet yang dibentuk oleh Roh Moo-Hyun. Beberapa departemen baru di masa pemerintahan ini adalah merupakan upaya untuk lebih serius dan terfokus menangani bidang yang dilayani, beberapa departemen dalam kabinet Roh baru itu antara lain departemen persamaan hak gender dan departemen lingkungan. Departemen baru ini adalah merupakan upaya dari pemerintah untuk menjawab aspirasi yang berkembang di dalam masyarakat, dengan terbentuknya beberapa departemen baru ini pemerintahan Roh mencoba untuk menjawab aspirasi masyarakat dalam bidang – bidang tersebut. Beberapa departemen yang diyakini sebagai jalan menuju Korea Selatan yang dapat membawa kemakmuran bagi masyarakatnya seperti departemen ilmu pengetahuan dan teknologi, departemen kesehatan dan kesejahteraan, dan departemen lainnya yang sama pentingnya masih dipertahankan di masa pemerintahan ini.

Bagan 3

Struktur Pemerintahan Republik Korea



Sumber bagan 3 : Korean overseas Information Service, Republic of
Korea, Seoul

Untuk kepentingan unifikasi yang gencar diusahakan sejak dahulu, Presiden Roh Moo-Hyun tetap mempertahankan urusan unifikasi dalam departemen Unifikasi. Bahkan departemen unifikasi oleh pemerintah diletakkan sejajar dengan departemen departemen urusan strategis negara seperti departemen pertahanan nasional, departemen luar negeri dan perdagangan, departemen keuangan dan ekonomi dan juga beberapa departemen strategis lainnya (lihat bagan 3). Langkah presiden Roh Moo-Hyun untuk mensejajarkan departemen unifikasi dengan departemen strategis kenegaraan lainnya karena dirasakan penanganan terhadap proses unifikasi dengan Korea Utara perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini wajar karena proses unifikasi juga sangat berpengaruh terhadap stabilitas keamanan di Semenanjung Korea, hubungan Korea Selatan dan Korea Utara akan menjadi semakin baik atau makin memburuk juga dipengaruhi oleh kinerja pemerintahan Korea Selatan yang diujung tombaki oleh Departemen unifikasi ini.

Dari uraian diatas, terlihat bahwa politik di Korea Selatan terbangun atas banyak karakter yang berbeda dan terdiri atas banyak pola kepemimpinan yang masing masing memiliki pola kepemimpinan yang berbeda satu sama lain. Karakter dan pola kepemimpinan ini pada akhirnya menghasilkan hasil kebijakan yang berbeda beda pula. Perbedaan karakter dari tiap masa pemerintahan ini akan berpengaruh pada pengambilan keputusan di saat ini atau pada masa yang akan datang, sehingga faktor sejarah pada akhirnya juga menentukan sebuah kebijakan yang dihasilkan di masa kini.

B. Nilai Politik Strategis Hubungan Dengan Kedua Negara Konflik

1. Hubungan Korea Selatan - Amerika Serikat

a. Mendukung Sistem Politik Dalam Negeri

Secara umum apabila dilihat dalam peta konflik di Semenanjung Korea atau secara lebih luas di wilayah Asia Timur Laut, negara-negara yang berdiri di wilayah ini pada umumnya memiliki konflik antara satu dengan yang lain, konflik ini disebabkan oleh benturan benturan politik yang baru ataupun yang telah lama (konflik historis). Khususnya untuk Korea Selatan, konflik yang masih terus berkembang pasang surut hingga saat ini adalah konflik dengan Korea Utara, sementara konflik historis dengan Jepang telah mulai terhapus seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan politik yang begitu cepat.

Dalam menjalankan pemerintahannya, Korea Selatan menjalankan sistem politik dalam maupun luar negerinya dengan berdasarkan pada asas demokrasi yang dari tahun ke tahun semakin liberal. Dari awal terbentuk Korea Selatan, dukungan dari asing sangat besar, terutama dukungan dari Amerika Serikat dan Perserikatan Bangsa Bangsa sangat berpengaruh terhadap peletakan dasar sistem politik Korea Selatan.

Setelah Korea Selatan berangsur angsur menjadi negara yang makin mandiri, pemerintah yang menjalankan pemerintahan di Korea Selatan juga tetap tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungannya akan peran dari Amerika Serikat. Sikap Korea Selatan yang terus berupaya menjaga hubungan politik dengan Amerika Serikat adalah sebuah wujud nyata dari semakin kuat dan mengakarnya kerjasama saling menguntungkan yang selama ini terjalin. Sistem politik yang demokratis dan liberal yang didukung oleh sistem perekonomian yang mengarah pada sistem kapitalis di Korea Selatan sangat memerlukan dukungan dari negara memiliki kekuatan modal dan berpengaruh. Untuk itulah hubungan politik antara Korea Selatan dengan Amerika Serikat tetap terus dipelihara dan dipertahankan.

Hubungan yang dipelihara ini disamping karena Amerika Serikat sangat berjasa sebagai sekutu tradisional Korea Selatan, akan tetapi hubungan ini sangat diperlukan untuk memperkuat sistem politik dan

pemerintahannya dari intervensi maupun infiltrasi dari kekuatan politik besar yang ada di kawasan Semenanjung Korea, terutama kekuatan Komunis yang sangat bertentangan dengan asas liberalisme. Apabila Korea Selatan dapat terus memelihara hubungan politik dengan Amerika Serikat yang secara garis besar memiliki kesamaan ideologi, maka kekuatan politik dalam negeri Korea Selatan juga semakin kokoh dan tidak mudah rapuh.

b. Pencarian Eksistensi dalam Politik Internasional

Saat ini eksistensi Korea Selatan untuk berperan aktif dalam percaturan politik di tingkat internasional semakin besar. Peran aktif Korea Selatan di dalam politik internasional ini kemudian berkembang seiring dengan sistem politik dan ekonomi terbuka yang diterapkan. Peran yang aktif di dunia internasional menjadi sebuah kebutuhan tersendiri bagi Korea Selatan. Politik dan ekonomi yang liberal menuntut pemerintah Korea Selatan untuk memperluas hubungan diplomatik di tingkat regional maupun internasional. Pada tingkat regional Korea Selatan menjalin kerja sama dan menjadi mitra dialog dalam ASEAN Regional Forum yang beranggotakan 21 negara, yang terdiri atas negara – negara ASEAN, dan sepuluh negara mitra dialog ASEAN (Amerika Serikat, Jepang, Kanada, Australia, Selandia Baru, Korea Selatan, Uni Eropa, Rusai, Cina, India) serta empat negara berstatus peninjau (Laos, Kamboja, Papua Nugini, Myanmar)⁴.

Oleh karena itu Korea Selatan perlu menjalin kerja sama dan membangun dialog dengan ASEAN Regional forum mengingat adanya beberapa konflik yang secara potensial bisa pecah menjadi perang terbuka antara lain adanya klaim sengketa teritorial di laut Cina Selatan, pergolakan di Semenanjung Korea, masalah Cina-Taiwan, perebutan Kepulauan Kuril antara Jepang dan Rusia, karena potensi pertikaian di dalamnya melibatkan negara-negara besar di kawasan Asia Pasifik.⁵

⁴ Yuen Foong Khong, *Regional Orders, Building Security in a New World*, The Pennsylvania State University Press University Park Pennsylvania hal 336

⁵ Alan Collins, *The Security Dilemmas of Southeast Asia Studies* (ISEAS) Singapore, 2002, hal. 102

Dari awal berdirinya Korea Selatan, pemerintahan Korea Selatan saat itu belum terlalu terfokus pada hubungan luar negeri, di saat itu pemerintahan masih terus terfokus pada penataan sistem politik dalam negeri yang terus dibenahi pasca perang Korea kemudian di masa pemerintahan Korea Selatan dibawah pemerintahan sipil, Korea Selatan mulai membenahi dan mengembangkan hubungan luar negeri yang telah dirintis di akhir pemerintahan sipil.

Setelah di bawah pemerintahan sipil (berturut turut di bawah pemerintahan Kim Young Sam, Kim Dae Jung, dan Roh Moo Hyun) hubungan diplomasi di tingkat regional maupun internasional berkembang pesat. Hal ini didukung dengan pemerintahan sipil yang bukan hanya terbuka terhadap aktifitas internasional, akan tetapi Korea Selatan di masa pemerintahan sipil ini mengembangkan perannya dengan lebih berperan aktif dalam beberapa kegiatan di dunia Internasional.

Peranan Korea Selatan untuk berperan aktif ini juga direspon positif oleh pemerintahan Amerika Serikat sebagai sekutu tradisional Korea Selatan. Peran Amerika Serikat untuk membantu Korea Selatan sangat besar.

Salah satu respon Amerika Serikat untuk mewujudkan keinginan Korea Selatan adalah mendorong Korea Selatan untuk berinteraksi dalam PBB (Persatuan Bangsa Bangsa). Di awal terbentuknya Korea Selatan sebagai negara, Amerika Serikat dengan membawa bendera PBB mendirikan pemerintahan sementara PBB di wilayah Korea Selatan. Hal lainnya adalah di bidang perekonomian, Amerika Serikat juga menjamin keanggotaan baru Korea Selatan dalam APEC. Dan hal terakhir yang cukup kontroversial adalah pengiriman pasukan Korea Selatan untuk turut

berperan bersama pasukan Amerika Serikat dan Inggris untuk bergabung bersama dalam operasi gabungan di Irak tahun 2002.

Kebutuhan Korea Selatan untuk berperan aktif dalam aktifitas internasional ini cukup beralasan. Alasan terkuat dari Korea Selatan adalah memperkuat posisi dan *bargaining position* Korea Selatan di kawasan. Dengan terlibat aktif di banyak organisasi internasional, Korea Selatan secara tidak langsung telah membangun persekutuan dengan negara-negara anggota organisasi Internasional yang diikutinya, baik itu di bidang ekonomi, politik maupun pertahanan keamanan. Dengan terbangunnya persekutuan ini, Korea Selatan semakin membuka diri untuk menjadi negara yang terbuka. Dengan sistem politik yang terbuka ini, Korea Selatan sangat membutuhkan peranan Amerika Serikat sebagai pendukung penuh dan penjamin dalam peranan Korea Selatan di dunia internasional.

2. Hubungan Korea Selatan – Korea Utara

a. Kepentingan Reunifikasi Korea Selatan – Korea Utara

Keinginan dan cita-cita Korea Selatan untuk dapat mewujudkan reunifikasi juga mempengaruhi kebijakan politik Korea Selatan terhadap konflik yang sedang terjadi antara Amerika Serikat dan Korea Utara. Untuk mewujudkan reunifikasi dan rekonsiliasi antara Korea Selatan dan Korea Utara ini dibutuhkan saling pengertian antara kedua belah pihak. Saling menjaga sikap antara Korea Utara dan Korea Selatan juga sangat menentukan berjalannya proses menuju ke arah Reunifikasi.

Selain itu faktor eksternal yang juga berpengaruh adalah kehadiran pihak ketiga dalam hubungan dua negara ini juga sangat mempengaruhi hubungan ini. Kehadiran Amerika Serikat, China, Rusia, dan juga Jepang juga cukup berpengaruh terhadap proses rekonsiliasi Korea Utara – Korea Selatan. Sebagai contoh jalur kereta api yang menyeberangi zona DMZ yang menghubungkan wilayah Korea Selatan dan Korea Utara dibuka kembali. Hal ini sebagai wujud nyata dari berhasilnya Konferensi Tingkat Tinggi Inter Korea 2000. Dari penghubungan kembali rel kereta api

Kyungui ini, akan menghubungkan jalan arteri utama antara penduduk Korea yang berada di wilayah Korea Selatan dan Korea Utara, penyambungan jalur kereta ini juga menghubungkan Seoul dengan perbatasan Korea Utara dan Cina, jalur lain sampai ke pantai timur Semenanjung Korea ke Rusia. Hal ini ini akan makin menggalakkan perdagangan dan menghemat biaya perkapalan.⁶ Imbas dari saling pengertian ini berpengaruh cukup besar dalam usaha rekonsiliasi Korea Selatan – Korea Utara. Seperti contoh diatas, dengan terlaksananya KTT Inter Korea banyak kemajuan yang diperoleh dalam upaya Rekonsiliasi. Akan tetapi Kehadiran Amerika Serikat sebagai faktor eksternal dalam hubungan Korea Utara – Korea Selatan juga mempengaruhi upaya rekonsiliasi dari Korea Selatan. Sebagai contoh dalam pembicaraan KTT Inter Korea 2000, telah disepakati akan diadakannya PTM (Pertemuan Tingkat Menteri) yang dilaksanakan secara kontinyu.

Pertemuan ini akan mempertemukan menteri kabinet dari masing masing negara untuk membicarakan kemungkinan kerjasama antara dua Korea di berbagai bidang. Dalam pelaksanaannya, PTM terlaksana dengan baik dan lancar hingga pada PTM ke 4, selebihnya dalam PTM ke 5 mulai terjadi ketegangan ketegangan di antara dua delegasi ini, kemudian pelaksanaan PTM ke 6 pun tidak dapat diselesaikan dengan baik karena kedua delegasi secara sepihak kembali ke negaranya dengan tanpa membawa hasil yang memuaskan. Ketegangan ini muncul karena tindakan provokatif dari presiden George W. Bush yang menyatakan Korea Utara adalah termasuk dalam negara *Axis of Evil* yang harus ditaklukkan, pernyataan ini kemudian ditanggapi oleh Korea Utara dengan sangat sensitif yang kemudian berpengaruh dalam Pertemuan Tingkat Menteri ke 6 ini.

Dari uraian diatas peran Amerika Serikat sebenarnya sangat berpengaruh di Semenanjung Korea. Karena pernyataan yang provokatif dari Bush mengakibatkan upaya rekonsiliasi menuju ke arah reunifikasi yang diupayakan oleh Korea Selatan mengalami gangguan.

Oleh karena itu ketika rencana perundingan dan pembicaraan untuk menyelesaikan konflik antara Amerika Serikat dan Korea Utara digelar dengan Cina sebagai penengah, Korea Selatan berusaha ikut berpartisipasi aktif dengan menawarkan diri ikut serta dalam perundingan tersebut.

b. Perjuangan untuk memperoleh dan Mempertahankan Kekuasaan

Korea Selatan yang berangsur-angsur menjadi demokratis setelah dipimpin oleh pemerintahan militer memerlukan pemerintahan yang mengedepankan aspirasi rakyatnya. Demokratisasi dan sistem pemerintahan yang liberal ini sangat memberi kebebasan dan pendidikan politik yang berarti bagi masyarakat Korea Selatan. Sistem dan sarana pendidikan yang memadai, pemberian ruang bagi gerakan buruh, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah contoh dari kebijakan pemerintah yang dapat membangun kemampuan masyarakat untuk mengerti tentang politik. Demikian juga dalam pemerintahan di Korea Selatan, aspirasi rakyatnya sangat menentukan keberadaan suatu rejim yang berkuasa. Sebagai contoh popularitas pemerintahan di masa Kim Dae Jung yang menanjak di mata rakyatnya semenjak pemerintahan ini memberlakukan Kebijakan Matahari Bersinar terhadap Korea Utara kemudian menjadi menurun drastis ketika ditemukan kasus korupsi yang dilakukan oleh keluarganya. Besarnya respon masyarakat Korea Selatan juga dapat dilihat dengan cukup banyaknya kelompok – kelompok penekan atau *political pressure groups* diantaranya adalah *Federation of Korean Industries, Federation of Korea Trade Unions, Korean Confederation of Trade Unions, Korean National Council of Churches, Korean Traders Association, Korean Veteran's Associations, national council of Labor Unions, National Democratic labor of Korea, National Federation of Farmer's Association, National Federation of Student Associations*.⁷ *Pressure Group* ini mencermati dan juga mengkritisi kebijakan dari pemerintah sesuai dengan kepentingannya. Suara dari masyarakat termasuk juga dari kelompok penekan ini kemudian menjadi pertimbangan juga dalam pembicaraan di tingkat parlemen.

Aspirasi parlemen adalah gambaran kepercayaan rakyat kepada pemerintahan yang sedang berkuasa. Parlemen yang terdiri dari wakil rakyat yang berasal dari partai-partai peserta pemilu ini duduk di kursi parlemen dan selalu memantau kinerja pemerintahan. *Pressure Group* ini mendasarkan kinerjanya pada aspirasi politik masyarakat. Aspirasi politik masyarakat ini kemudian disampaikan dalam bentuk partisipasi politik. Partisipasi politik masyarakat adalah sebuah bentuk keikutsertaan dan kepedulian masyarakat terhadap setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah berkuasa, bahkan turut serta dalam mengambil sebuah kebijakan. Untuk dapat lebih memahami bentuk dan pola partisipasi politik dari masyarakat dalam sebuah negara, Huntington dan Nelson mengelompokkan partisipasi politik dalam beberapa pola tertentu, pola ini adalah⁸:

1. Partisipasi melalui pemberian suara dalam pemilihan. Partisipasi jenis ini paling memungkinkan bagi semua strata anggota masyarakat karena tidak memerlukan kecanggihan pengetahuan ataupun komitmen – komitmen politik yang khusus.
2. Partisipasi dalam kegiatan-kegiatan kampanye untuk pemilihan ataupun amandemen konstitusi. Partisipasi jenis ini menumbuhkan dedikasi tinggi dan komitmen politik yang khusus karena tidak semua orang dapat melakukannya.
3. Partisipasi melalui diskusi politik. Pentingnya diskusi politik ini adalah karena kegiatan ini merupakan sarana untuk membentuk opini publik dan kristalisasi isu-isu sosial sehingga partai politik dapat mengartikulasikan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan masyarakat.
4. Usaha untuk memberi pengaruh politik melalui keterlibatan dalam kelompok atau organisasi. Kesadaran akan lebih pentingnya organisasi daripada aksi perorangan memerlukan tingkat pengetahuan tertentu dan kesadaran politik yang cukup tinggi, sehingga hanya orang dengan pendidikan memadai yang dapat melakukannya.

⁸Samuel Huntington dan Nelson, *An Introduction Of Political Participation*, Oxford University Press, London 1997 hal 198

5. Partisipasi dalam bentuk kontak langsung atau melakukan *lobby* (tawar-menawar) dengan pejabat pemerintah. Untuk melakukan partisipasi jenis ini seseorang harus memiliki konsep yang jelas tentang masalah yang akan dibicarakan, karena itu ia harus memiliki tingkat pengetahuan dan wawasan politik yang memadai.

6. Partisipasi dalam aksi kekerasan, yakni usaha untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah dengan cara merusak benda

benda dan mencederai orang lain. Partisipasi politik ini seringkali mengandung resiko tinggi dan membutuhkan keyakinan dan komitmen politik yang tinggi. Roh Moo Hyun di masa kampanye dalam pemilu tahun 2002 sangat keras terhadap Amerika Serikat, berbagai kritik diutarakan oleh Roh atas Amerika Serikat. Kritik yang berisi tentang kebijakan Amerika Serikat terhadap Korea Utara dan kehadiran Amerika Serikat di Korea Selatan diutarakan, dan isu tersebut telah mengangkat nama Roh Moo Hyun untuk menjadi alternatif pilihan rakyat Korea Selatan dalam pemilu 2002. Di masa pemerintahan Korea Selatan yang demokratis, kebijakan pemerintah selalu disorot oleh berbagai pihak diantaranya masyarakat yang biasanya terwujud dalam aksi aksi demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi sedangkan di tingkat legislatif adalah kritikan kritikan yang banyak dikemukakan oleh partai oposisi. Demikian juga konsistensi akan program kerja yang telah dikemukakan oleh seorang calon presiden sewaktu kampanye, konsistensi untuk melaksanakannya ketika pemerintahan berjalan juga menjadi penilaian tersendiri. Isu yang populer tentang kebijakan pemerintah terhadap Korea Utara juga menjadi pertimbangan masyarakat Korea Selatan dalam memberikan dukungannya.

Dengan kondisi negara yang memberi kebebasan masyarakat untuk berpolitik memungkinkan masyarakat Korea Selatan untuk menyampaikan aspirasi politiknya terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam bentuk apapun. Sehingga pemerintahan Korea Selatan yang demokratis akan menyikapi konflik yang terjadi antara Korea Utara dan Amerika Serikat dalam krisis nuklir ini dengan lebih berhati hati,

karena Hubungan Korea Selatan – Korea Utara adalah salah satu isu yang sangat sensitif di kalangan masyarakat Korea Selatan. Peran serta pemerintahan Roh Moo Hyun turut serta dalam penyelesaian krisis nuklir akan mempengaruhi dukungan politik dalam negeri terhadap pemerintahan yang berkuasa.



BAB IV

KEBIJAKAN EKONOMI KOREA SELATAN DALAM PENYELESAIAN KRISIS NUKLIR SEMENANJUNG KOREA

A. Pertumbuhan Ekonomi Korea Selatan

Modernisasi dan pembangunan ekonomi Korea sebenarnya sudah dimulai pada abad ke-19, yaitu pada masa dinasti Yi (1860-1910) yang melakukan reformasi pertanian dan pembangunan sarana-sarana fisik kerajaan Korea pada saat itu. Pengembangan pembangunan infrastruktur perekonomian kemudian dilanjutkan pada masa pemerintahan kolonial Jepang pada tahun 1910-1945.¹

Di masa penjajahan Jepang ini, mulai diperkenalkan pembangunan perekonomian modern, misalnya pembangunan infra struktur seperti waduk untuk irigasi, jalan raya, jembatan, dan sarana transportasi lain yang bertujuan untuk mengangkut hasil bumi dan mineral Korea. Walaupun baru memperkenalkan sedikit dari sistem perekonomian modern, Jepang juga telah mulai memperkenalkan sistem perindustrian, kompleks perindustrian perindustrian tekstil dan makanan adalah contoh dari industrialisasi yang diperkenalkan oleh Jepang pada rakyat Korea.

Setelah berakhirnya perang dunia II, Korea Selatan yang kemudian dibawah pendudukan Amerika Serikat mendapatkan bantuan dari PBB dan Amerika Serikat guna membangun perekonomian Korea yang telah mengalami kemerosotan dan kekurangan pangan semenjak ditinggalkan pemerintah kolonial Jepang. Perkembangan dari pertumbuhan ekonomi Korea Selatan berawal dari masa pemerintahan presiden pertama Korea Selatan Sygman Rhee.

¹Richard M. Stears, et.al., *The Chaebol : Korea's New Industrial Might*, 1989, Harper & Row Pulishers, New York, hal.9-10.

Di masa pemerintahan Sygman Rhee ini ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, terutama bantuan dari Amerika Serikat sangat ditunjang pula oleh doktrin antikomunisme, antipati terhadap Jepang dan patriotisme inilah yang kemudian menyebabkan ketergantungan negara pada bantuan pihak asing terutama Amerika Serikat semakin tinggi. Walaupun telah mendapat dukungan secara penuh dari Amerika Serikat, perekonomian Korea Selatan semakin merosot, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Semenjak di bawah pemerintahan Jepang, Korea menjadi pengeksport produk-produk pertanian, akan tetapi sejak 1953 pertumbuhan penduduk meningkat dengan cepat dan berimbas pada kebutuhan pangan yang meningkat pula. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat, Korea Selatan baru dapat memenuhi dari hasil pertanian lokal (dalam negeri). Hasil pertanian dalam negeri yang seharusnya menjadi komoditas ekspor andalan pada akhirnya harus digunakan untuk mencukupi kebutuhan pangan dalam negeri Korea Selatan. Ketergantungan pendapatan nasional negara terhadap hasil pertanian mengakibatkan kejatuhan pendapatan negara ketika terjadi ledakan penduduk lokal yang mengkonsumsi hasil pertanian lokal Korea Selatan.
2. Dihadapkan pada konfrontasi yang belum selesai dengan Korea Utara. Ancaman dari terjadinya konfrontasi lanjutan dengan Korea Utara juga cukup mempengaruhi terhadap perkembangan perekonomian dalam negeri Korea Selatan, hal ini dikarenakan stabilitas keamanan negara yang tidak stabil mengakibatkan banyak kekhawatiran dari berbagai pihak akan adanya perang yang terulang kembali. Kekhawatiran ini juga dialami oleh para pelaku ekonomi, termasuk investor-penanam modal.
3. Administrasi yang baru saja lepas dari perang Korea menyebabkan pemerintahan yang disibukkan dengan restrukturisasi sesudah perang dan pemeliharaan tatanan politik. Sektor perekonomian belum begitu mendapat perhatian karena fokus dari pemerintah adalah mengatur kembali tatanan politik setelah perang yang masih banyak ketimpangan.

Akan tetapi, di masa pemerintahan Sygman Rhee masih ada beberapa nilai positif yang turut mendukung dan meletakkan dasar bagi perekonomian

Korea Selatan. Di masa pemerintahan ini telah diletakkan landasan bagi pembangunan masa depan Korea Selatan melalui *land reform*. Tujuan dari kebijakan itu adalah untuk membangun kembali daerah pertanian, membagi kembali tanah-tanah pertanian yang dimasa dinasti Yi hingga kolonial dikuasai oleh kaum *Yang Ban* dan para tuan tanah, dan juga memberi insentif pada para petani supaya mampu meningkatkan taraf hidupnya.² Hal ini menyebabkan kenaikan pendapatan di sektor pertanian dan mampu menyerap 66 persen tenaga kerja.

Perekonomian Korea Selatan mengalami perkembangan pasang surut seiring dengan perkembangan politik dan kebijakan dari masing masing masa pemerintahan. Di masa pemerintahan Park Chung Hee, kemajuan perekonomian dicapai dengan menerapkan doktrin politik. Penerapan doktrin politik di masa pemerintahan Park ini adalah suatu strategi pembangunan yang menekankan pada peran pemerintah yang sangat besar dalam aktifitas perekonomian dan mobilisasi berbagai segmen dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam industrialisasi. Perkembangan perekonomian makin terasa di masa pemerintahan ini. Di masa pemerintahan ini kebijakan yang otoriter dan represif menciptakan stabilitas politik domestik yang berpengaruh juga pada perkembangan pembangunan perekonomian nasional Korea Selatan. Diawal tahun 1960-an, presiden Park mencetuskan program rencana pembangunan lima tahun. Program rencana lima tahunan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Rencana Pembangunan Lima Tahun I (1962-1966)

Di dalam Rencana Pembangunan Lima Tahun I ini diberlakukan ekonomi campuran yang dibatasi dengan konsep kapitalisme terpimpin. Di dalam konsep ini diperkenankan prinsip kebebasan berusaha dan berinisiatif dan pemerintahan secara langsung maupun tidak langsung memberi petunjuk pada kelompok/institusi yang sedang berusaha ini.

²Andrew C. Nahm, *Introduction to Korean History and Culture*, 1993, Hollym Corp. Publishers, Seoul, hal.320

Di tahun 1964 pemerintahan Park merubah kebijakan orientasi perekonomian dari *Import-Substitution-industry* menjadi *Export-Oriented-Industry*. Kebijakan ini diambil sebagai upaya untuk lebih mengenalkan produk – produk dalam negeri Korea Selatan di dunia internasional. Produk yang pertama kali dipromosikan adalah barang barang manufaktur ringan. Dengan merubah kebijakan orientasi perekonomian ke arah *Export-Oriented-Industry* pemerintah bertujuan untuk memasarkan produk produk dalam negeri Korea Selatan. Hal ini dilakukan sebagai langkah promosi produk dalam negeri ke luar negeri.

2. Rencana Pembangunan Lima Tahun II (1967-1971)

Di Rencana Pembangunan Lima Tahun II ini peranan swasta semakin diperbesar dan peran pemerintah makin diperkecil. Di periode inilah terjadi transisi dari masyarakat tardisional ke masyarakat industri karena struktur ekonomi mulai berubah. Perubahan ini juga seiring dengan perubahan jumlah penduduk yang berpindah mata pencaharian ke sektor industri dari sektor agraris. Di periode ini investasi rata-rata 20 persen dari GNP selama Rencana Pembangunan Lima Tahun I menjadi lebih dari 30 persen pada Rencana Pembangunan Lima Tahun II.

3. Rencana Pembangunan Lima Tahun III (1972-1976)

Di dalam periode ini muncul rezim Beraucratic-otoritarian, hal ini karena dikeluarkannya konstitusi Yusin pada tahun 1972. Dengan dikeluarkannya Konstitusi Yusin ini semakin memperkokoh pemerintah untuk memimpin negara dengan otoriter dan lebih birokratis. Di sisi lain pertumbuhan ekonomi terus meningkat hingga memasuki Rencana Pembangunan Lima Tahun IV.

4. Rencana Pembangunan Lima Tahun IV (1977-1981)

Perekonomian nasional Korea Selatan mengalami pergeseran dari industri ringan ke industri berat. Pergeseran ini menandakan bahwa perkembangan perindustrian di masa pemerintahan Park cukup pesat, karena industri ringan yang telah berhasil mampu menyokong usaha pemerintah

untuk mengembangkan ke arah industri berat. Presentasi perkembangan industri ini adalah 51,4 persen dari seluruh industri di tahun 1978 dan menjadi 55,4 persen pada tahun 1980.

Setelah melewati lebih dari tiga dekade, pertumbuhan Korea Selatan mulai terlihat hasilnya di masa pemerintahan Kim Dae Jung. Di masa pemerintahan ini, pertumbuhan ekonomi tahunan sebesar 8,6 % dan menjadi negara dagang terbesar ke sebelas di dunia. Dalam kurun waktu kurang dari dua generasi, Korea Selatan telah mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu negara termaju di dunia di bidang perkapalan, perpabrikasi, elektronika, semi konduktor, dan mobil. Pasar keuangan internasional secara positif mengakui keberhasilan ekonomi Korea, termasuk pertumbuhan tinggi yang terus menerus, inflasi yang sedang, tabungan nasional yang tinggi, defisit eksternal yang minimal dan surplus anggaran pemerintah yang signifikan.

Di tahun 1997 krisis ekonomi melanda Asia. Korea Selatan juga terkena dampak dari krisis ekonomi yang mengglobal ini. Pada masa krisis ini timbul kekhawatiran dari para investor untuk berinvestasi lebih lanjut di Korea Selatan. Krisis juga telah menyebabkan masalah pengangguran yang serius yang menyebabkan kesulitan kesulitan sosial dan ekonomi Korea Selatan.

Di masa pemerintahan Kim Dae Jung ini, Korea Selatan mengambil tindakan tindakan yang lebih komprehensif. Di bawah pimpinan Kim Dae Jung kebijakan ekonomi dilakukan dengan langkah penyesuaian yang lebih keras untuk mengatasi krisis ekonomi. Pemerintah mengambil langkah untuk mempromosikan reformasi di beberapa bidang. Reformasi ekonomi tersebut mencakup restrukturisasi sistem yang dipakai *Chaebol*, promosi fleksibilitas di pasar tenaga kerja, liberalisasi pasar domestik, dan daya tarik bagi investasi asing.³

Restrukturisasi juga dilakukan pada bidang keuangan. Sebuah ekonomi modern yang berbasis pasar tidak akan efisien tanpa lembaga – lembaga keuangan yang dinamis dan diawasi dengan baik. Untuk mencapai kebutuhan penting ini, Komisi Pengawas Keuangan (FSC) yang berfungsi

³Pelayanan Informasi Korea, *Korea Selayang Pandang*, Badan Informasi Korea, Seoul, Republik Korea 1999, hal 70

sebagai sebagai sebuah mekanisme pengatur yang menetapkan praktek praktek bank secara universal, telah menciptakan sebuah peraturan dan pengawasan baru yang lebih berhati hati dan penjadwalan untuk pelaksanaan reformasi. FSC memainkan peran penting dalam mempromosikan Korea karena mudah berubahnya pasar pasar keuangan internasional. Dalam proses reformasi sektor keuangan, pemerintah telah menutup beberapa lembaga keuangan yang tidak dapat berjalan dengan baik. Bank bank yang masih dapat berjalan meneruskan dengan mengikuti tindakan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh FSC untuk memperbaiki kinerja mereka.

Restrukturisasi juga dilakukan untuk sektor keuangan non – bank. Langkah restrukturisasi ini antara lain dengan menghentikan dan mengambil alih empat perusahaan asuransi jiwa yang bangkrut. Dan sebanyak 79 badan keuangan non – bank telah dihentikan atau izin mereka dicabut.

Pemerintah juga memobilisasi sumber sumber fiskal sejumlah 64 trilliun Won (kurang lebih 50 milyar dolar AS) untuk mendukung lembaga lembaga keuangan yang masih berjalan sehubungan dengan rekapitalisasi mereka dan menyelesaikan utang utang mereka. Lembaga lembaga keuangan juga mengintensifkan usaha – usaha rehabilitasi mereka sendiri, termasuk perampingan dan perangsangan investasi modal asing.

Restrukturisasi lain yang dilakukan di masa pemerintahan ini adalah di dalam sektor korporat. Sejumlah perusahaan yang tidak berjalan dipaksa untuk menghentikan operasi mereka sementara proses penyesuaian dengan bank bank pemberi kredit dimulai terhadap perusahaan perusahaan yang masih berjalan. Tindakan legislatif untuk memperkuat transparansi manajemen korporat, pelepasan jaminan jaminan pembayaran dan memperkuat pertanggung jawaban pengawasan pemegang saham dan manajemen juga diterapkan.

Restrukturisasi terhadap korporasi *Chaebol* difokuskan pada lima *Chaebol* terbesar di negeri ini. Restrukturisasi ini dilakukan karena peran *chaebol* sangat besar dalam pembangunan perekonomian Korea Selatan.

Restrukturisasi terhadap lima *Chaebol* terbesar ini antara lain mencakup pada rencana perbaikan struktural permodalan, termasuk likuidasi cabang cabang yang tidak berjalan, peniadaan jaminan dan pengurangan *eksposure* bank yang besar. Dengan diambilnya keputusan ini mempersempit konglomerat untuk mengkhususkan diri pada tiga sampai lima sektor inti yang memungkinkan mereka berhasil berkompetisi secara global. Cabang cabang *chaebol* juga dikurangi dari dua ratus enam puluh empat menjadi hanya seratus tiga puluh dengan masing masing *chaebol* memiliki rata rata lima belas sampai dua puluh lima afiliasi saja.

Perampingan lima *chaebol* utama erat hubungannya dengan restrukturisasi tujuh target industri, termasuk semi konduktor, petrokimia, penerbangan, dan lok lok kereta api. Pihak perbankan juga turut mengawasi kemajuan reformasi lima *chaebol* utama ini. Bank Bank pemberi kredit di masa ini telah mampu untuk mendesak *Chaebol - chaebol* menjual unit unit mereka yang tidak produktif. Mereka juga dapat menghentikan perluasan pinjaman pinjaman baru kepada afiliasi afiliasi mereka yang tidak dapat terus berjalan. Disamping restrukturisasi terhadap lima *chaebol* utama tadi, lebih dari dua ratus lembaga keuangan telah menandatangani "Persetujuan Restrukturisasi Korporat" untuk memudahkan "Program Program Percobaan" yang melibatkan cabang - cabang *chaebol* yang secara keuangan lemah tetapi masih dapat berjalan dan juga perusahaan perusahaan non *chaebol*. Perusahaan kecil dan menengah kemudian dapat mengambil keuntungan dari perluasan lingkup program ini karena dapat makin berkembang.

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun, pemerintahan dijalankan dengan fokus utama di bidang pembangunan perekonomian masih dominan mewarnai kebijakan kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah lebih diperjelas dengan menyampaikan beberapa rencana pembangunan infrastruktur yang nantinya akan dapat mendukung kegiatan perekonomian.

Di masa pemerintahan Roh Moo Hyun ini mencoba untuk mengembangkan Korea menjadi pusat perekonomian Asia Timur Laut, beberapa cara yang diambil adalah:⁴

1. Membuat sebuah sistem kerjasama ekonomi Asia Timur Laut
2. Mendorong pertukaran dan kerjasama ekonomi antar Korea.
3. Membangun pusat logistik dan bisnis.

Dalam rangka merencanakan membangun pusat logistik di Asia Timur Laut melalui beberapa langkah di bawah ini :

1. Membangun bandara Internasional Incheon sebagai pusat bandara Asia Timur Laut, sambil mempromosikan pelabuhan Gwangyong dan Busan menjadi pelabuhan pusat daerah
2. Mengembangkan bandara Internasional dan pelabuhan Incheon sebagai pusat logistik wilayah metropolitan Seoul.
3. Menghubungkan kembali dua jalur kereta api dan jalan raya antar – Korea yang sedang dibangun, dan membangun jaringan transportasi yang menghubungkan dengan jalur kereta api trans – cina (ICRA) . Dan juga membangun jaringan informasi logistik terpadu yang menghubungkan bandara dan pelabuhan pada tahun 2015.

Jika dilihat di masa pembangunan perekonomian pemerintahan Roh Moo Hyun ini pemerintah mampu untuk menopang perekonomian dalam negerinya, akan tetapi dimasa pemerintahan Roh ini kemudian diperluas lagi sehingga potensi-potensi yang ada di luar negeri juga bisa menopang perekonomian dalam negeri Korea Selatan, salah satu jalannya adalah dengan membangun dan meningkatkan potensi infrastruktur yang ada sehingga dapat berdaya guna maksimal untuk mencapai kemajuan perekonomian.

B. Arti Penting Amerika Serikat dalam Perekonomian Korea Selatan

Peran Amerika Serikat dalam perkembangan perekonomian Korea Selatan cukup besar. Sesudah terjadinya perang dingin Korea Selatan mulai membangkitkan perekonomiannya dengan mengejar pertumbuhan yang berorientasi ekspor. Lingkungan ekonomi internasional yang selalu

⁴Pelayanan Informasi Korea, *Fakta Tentang Korea*, Badan Informasi Nasional, Seoul, Republik Korea 2003 hal 60

berkembang dan berubah menyebabkan Korea Selatan banyak melakukan kerjasama ekonomi dalam berbagai bentuk dengan negara maju seperti Jepang Amerika Serikat, dan beberapa negara maju di kawasan Eropa.

a. Amerika Serikat Sebagai sumber alih teknologi dan ilmu pengetahuan Korea Selatan .

Pada tahun 1966-1967, dengan tujuan untuk membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi Korea Selatan dipusatkan pada pengenalan, penyerapan, dan penerapan teknologi dari luar (asing). Ketika bidang ilmu pengetahuan dan teknologi mulai mengalami kemajuan setelah mencoba untuk mengenal, menyerap, dan menerapkan teknologi yang berbasis pada teknologi asing, Korea Selatan mulai menekankan pada perencanaan dan pengadaan proyek nasional R & D untuk meningkatkan ketrampilan pengetahuan dan teknologi. Sejak awal 1990-an, pemerintah telah memberikan perhatian pada tiga hal, yaitu: membantu pengembangan penelitian ilmu pengetahuan dasar, menjaga distribusi dan penggunaan sumber R & D secara efisien, dan meluaskan kerja sama internasional.

Keberhasilan dalam membangkitkan kembali pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dicapai cara "berguru" kepada teknologi asing termasuk juga Amerika Serikat dan negara – negara maju lainnya di kawasan Eropa. Kebijakan tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan perekonomian Korea Selatan. Perkembangan yang pesat dalam sektor industri adalah contoh dari keberhasilan Korea Selatan dalam menyerap iptek yang didapat dari negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, dan negara maju teknologi lainnya di kawasan Eropa. Industri ringan yang mengintensifkan tenaga buruh adalah awal dari pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara perlahan digantikan dengan industri berat dan kimia yang memenuhi lebih dari separuh hasil manufaktur negara ini secara keseluruhan. Korea kemudian juga mampu menghasilkan berbagai mesin dan perlengkapan industri.

Berikut adalah tabel komoditi ekspor utama di Korea Selatan pada tahun 1968 dan tabel perkembangan produk-produk pabrikan.⁵

Tabel.1

Komoditi Ekspor Utama di Korea Selatan pada Tahun 1968 21

Komoditi	Ekspor (juta \$ AS)	Persen (%)
Kayu Lapis	65,6	13,1
Rambut Palsu	35,5	7,1
Garmen Pakaian Dalam	28,7	5,7
Garmen lain	26,8	5,4
Bahan Mentah Sutera	18,0	3,6
Ikan Segar	16,9	3,4
Serat Tenun	16,7	3,3
Rumput Laut Kering	13,7	2,7
Serat Tenun Kapas	13,3	2,7
Biji Tungsten	11,1	2,2
Lain-lain	254,1	52,0
Jumlah	500,4	100,0

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Tabel.2

Produk-Produk Pabrikan Korea Selatan

Tahun	Perpabrikan Mobil	Pesanan Pembuatan Kapal	Perpabrikan Baja (1000metrik/tonase)

⁵Park Chang – ho dan Anggoro Sigit Sutanto., dkk , *Gerakan Masyarakat Baru di Korea : Filosofi dan Aplikasi Saemaul Undong*, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda DEPDIKNAS dan Korea International Cooperation Agency (KOICA), 2002 hal 35

	(Dalam Ribuan)	(1000metrik/tonase)	
1970	29	-	7,310
1980	123	1,690	9,341
1990	1,322	4,382	24,868
1995	2,530	7,133	36,772
1997	2,818	12,749	42,554
1999	2,843	11,843	41,042
2000	3,115	20,686	43,107
2002	3,148	9,755	51,983

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Demikian juga perkembangan industri sampingan seperti industri elektronik juga merupakan sektor pertumbuhan penting yang turut menjadi alat pembangkit penting nilai tukar mata uang asing.

b. Amerika Serikat sebagai Penanam Modal Asing

Di awal tahun 1960, Korea Selatan sangat ketat menyaring para penanam modal asing yang akan menanam modalnya di Korea Selatan. Akan tetapi ketika kondisi lingkungan ekonomi global berubah, pemerintah Korea Selatan di tahun 1984 menerapkan undang undang yang baru yang mengatur tentang Investasi Asing Langsung (FDI). Undang undang ini makin memperjelas aturan tentang investasi asing langsung. Setelah diberlakukannya undang undang ini Investasi Asing Langsung (FDI) yang masuk ke Korea Selatan secara teratur meningkat dari tahun 1984. Berikut adalah tabel investasi langsung oleh pihak asing di Korea Selatan

Tabel.3

Tabel Investasi Langsung oleh Pihak Asing di Korea Selatan

(unit : Milyar Dollar AS)

Tahun	Total	A S	Jepang	Lain – Lain				
				Total	Hong kong	Jerman	Inggris	Prancis
1980	143,1	70,6	42,5	30,0	0,5	8,6	2,3	-
1985	532,26	108,0	364,3	59,9	13,4	11,3	12,3	5,1
1990	802,6	317,5	235,9	249,2	3,0	62,3	44,8	22,4
1995	1.9472	644,9	418,3	878,2	58,0	44,6	86,7	35,2
1997	6.970,0	3.189,6	265,7	3.515,6	84,6	398,1	258,6	410,7
1998	8.852,6	2.976,0	503,0	5.373,0	38,4	786,8	60,0	367,5
1999	15.541,5	3.379,0	1.750,0	10.052,0	461,0	960,0	479,0	760,0
2000	15.216,7	2.922,0	2.448,0	10.327,0	123,0	1,599	84,0	607,0
2001	11.291,8	3.890,0	772,0	7.208,0	167,0	459,0	432,0	426,0
2002	9.101,0	4.500,0	1.403,0	3.198,0	234,0	284,0	115,0	111,0

Sumber : Departemen Pernaagaan, Industri dan Energi Korea Selatan

Partisipasi asing yang aktif sangat penting bagi ekonomi Korea Selatan karena dapat menjamin pertumbuhan jangka panjang yang bertahan. Pada tahun 2000, jumlah keseluruhan FDI adalah 15,2 milyar dolar AS dan tahun 2001 jumlah keseluruhannya mencapai 11,2 milyar dolar AS. Dengan dukungan dan kebijakan pemerintah yang memudahkan investasi asing masuk di Korea, penanaman investasi di Korea berkembang pesat. Strategi dengan meliberalisasikan perekonomian untuk para penanam modal asing ini adalah upaya untuk mengembangkan pasar modal terpusat. Pengembangan pasar modal terpusat pada dua kebijakan yang saling berhubungan, yaitu liberalisasi pasar dan penambahan pasar. Liberalisasi pasar modal akan secara langsung meningkatkan akses Korea Selatan kepada modal dan teknologi asing, sementara pertumbuhan pasar akan memperbaiki efisiensi operasional pasar modal.

C. Arti Penting Korea Utara Terhadap Perekonomian Korea Selatan.

Arti penting Korea Utara bagi Korea Selatan sekaligus memberikan implikasi yang sangat positif bagi kebijakan Korea Selatan terhadap krisis nuklir di Semenanjung Korea. Dalam dinamika krisis nuklir dan persenjataan, peningkatan kemampuan persenjataan suatu negara juga meningkatkan kadar ancaman yang mungkin dirasakan oleh negara lain. Pemilikan senjata yang lebih rendah akan mengurangi persepsi tingkat ancaman itu tanpa mengubah kekuatan relatif dan mungkin akan membuka jalan ke arah penyelesaian politik. Selama tingkat pemilikan persenjataan masih tinggi, selama itu penyelesaian melalui jalur politik mungkin akan selalu menemui jalan buntu. Pengurangan senjata tidak mungkin terjadi selama hubungan politik belum baik. Sebaliknya, hubungan politik tidak akan semakin membaik, kalau dalam suatu sistem yang anarkis tidak ada saling percaya antar negara satu dengan yang lain. Dalam keadaan seperti ini memiliki senjata yang canggih dianggap sebagai cara terbaik untuk meningkatkan keamanan nasionalnya. Perdebatan akan terus berlangsung tentang bagaimana harus keluar dari lingkaran setan ini. Dalam kaitan dengan itu, kerjasama non militer dapat memainkan peranan penting karena kerjasama politik saja tanpanya tidak akan mampu menciptakan hubungan yang stabil untuk jangka waktu yang lama, dan kerjasama ekonomi memainkan peran yang paling penting dalam upaya mengatasi konflik termasuk krisis nuklir sekalipun. Hubungan dan kerjasama bidang ekonomi antar dua negara dapat meredakan atau mengurangi kecenderungan konflik. Kaum liberal beranggapan bahwa meningkatnya hubungan ekonomi akan memperbesar kemungkinan suatu negara untuk memperoleh keuntungan bersama, jika negara itu memilih kerjasama dan bukan konflik. Jaringan kerjasama yang saling menguntungkan ini justru sebagai pengikat dan merasa saling tergantung satu sama lain. Korelasi hubungan ekonomi tersebut, jika ia memenuhi persyaratan tertentu, dapat mengurangi kemungkinan konflik.⁶

⁶Lloyd J. Dumas, "Economics and Alternative Security: Toward a Peacekeeping International Economy", dalam Burns H. Weston, ed., *Alternative Security: Living Without Nuclear Deterrence*, (Boulder, CO, : Westview Press, 1990), hal.155-170

a. Sebagai Pasar baru di Kawasan Semenanjung Korea.

Hubungan perdagangan antara dua Korea ini sebenarnya cukup berkembang dan berjalan dengan baik. Kebijakan pemerintah Korea Selatan yang cukup liberal dan demokratis juga berpengaruh pada pengambilan kebijakan ekonomi terhadap Korea Utara.

Usaha Korea Selatan untuk menjadikan Korea Utara sebagai mitra dan pasar di Semenanjung Korea ini dapat terlihat mencolok ditahun 1998. Proses sebuah pasar (ada jual beli) juga terlihat di tahun 1998, dalam perdagangan antar Korea kegiatan ekspor dan impor berjalan dan berkembang pasang surut seiring dengan perkembangan politik.

Volume perdagangan meningkat sampai 211 juta dolar AS pada Desember dari 11 juta dolar AS di bulan Januari. Untuk barang-barang seperti tekstil dan bahan-bahan kimia dikapalkan dari Korea Selatan ke Korea Utara. Berikut adalah tabel perkembangan perdagangan antar Korea di tahun 1998

Tabel. 4
Perdagangan Antar-Korea (Januari-Desember 1998)
(Satuan 1.000 AS)

Tahun	Impor dari Utara	Ekspor dari Utara	Jumlah
1998.1	6,575	5,011	11,586
1998.2	5,977	3,762	9,739
1998.3	4,370	7,719	12,089
1998.4	4,641	7,024	11,665
1998.5	4,622	8,930	13,552
1998.6	5,806	13,370	19,176
1998.7	8,256	13,986	22,242

1998.8	12,065	4,131	16,196
1998.9	11,663	18,994	30,657
1998.10	10,640	23,404	34,044
1998.11	9,781	14,421	24,202
1998.12	7,867	10,831	18,698
Jumlah	92,262	131,583	223,846

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

Beberapa langkah ditempuh oleh pemerintah untuk dapat menciptakan pasar baru antara Korea Selatan dan Korea Utara. Pada tanggal 30 April 1998 dengan tujuan agar kerjasama ekonomi antar Korea semakin luas, pemerintah mengizinkan para ketua grup bisnis besar dan juga organisasi-organisasi ekonomi untuk mengunjungi Korea Utara dengan tujuan bisnis. Hal ini cukup mendapatkan hasil yang positif, contohnya Grup Hyundai kemudian membuat proyek wisata ke Gunung Kumgang dan menanamkan investasinya untuk proyek ini. Di bidang perdagangan dan usaha bisnis, pemerintah menaikkan jumlah barang-barang untuk diimpor yang sebelumnya dibatasi pengirimannya. Pemerintah juga mempermudah pembatasan pembatasan pengapalan bagi barang-barang produksi perusahaan Korea Selatan di Korea Utara dan mempermudah pembatasan-pembatasan jumlah investasi yang diperbolehkan di Korea Utara. Berikut adalah tabel perdagangan antar Korea dari tahun 1998 hingga 2002

Tabel. 5

Perdagangan antar Korea dari 1998 – 2002

(unit : 1.000 dollar AS)

Tahun	Impor dari Utara	Ekspor dari Utara	Total
1998	92,264	129.679	221,943
1999	121.604	211.832	333.437

2000	152.373	272.775	425.148
2001	176.170	266.787	402.957
2002	271.575	370.155	641.730

Sumber : Departemen Perdagangan, Industri dan Energi Korea Selatan

b. Sebagai Kunci Stabilitas Ekonomi Kawasan

Stabilitas keamanan sebuah kawasan tergantung pada stabilitas politik di negara negara yang ada di kawasan tersebut. Stabilitas keamanan sebuah negara akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian sebuah negara atau negara lainnya. Artinya pertahanan keamanan sebuah negara yang stabil akan sangat mempengaruhi stabilitas perekonomian negara tersebut, dan juga akan mempengaruhi stabilitas perekonomian negara lain yang masih dalam satu kawasan.

Hal itu juga terjadi di kawasan Semenanjung Korea. Terjadinya stabilitas keamanan di dalam negeri Korea Utara juga sangat berpengaruh pada perkembangan perekonomian dalam negeri dan juga berpengaruh pada perkembangan perekonomian negara negara lain yang ada di sekitar Semenanjung Korea, termasuk juga Korea Selatan. Khususnya untuk Korea Selatan, penciptaan hubungan yang baik dengan Korea Utara sangat diperlukan karena dengan membina hubungan tersebut akan menimbulkan citra aman di kawasan semenanjung Korea. Banyak anggapan bahwa apabila hubungan Korea Selatan – Korea Utara baik maka stabilitas keamanan di Semenanjung juga aman. Hal ini dapat dipahami karena memang dua negara ini sejak perang Korea hingga sekarang adalah negara yang masih dalam status perang.

Korea Utara sebagai negara yang sejak lama kontra akan kehadiran Korea Selatan di Semenanjung Korea juga menjadi tantangan tersendiri bagi Korea Selatan. Dengan sistem pemerintahan yang diktator komunis tersebut sangat jauh berbeda dengan sistem Korea Selatan yang sangat demokratis. Korea Utara memiliki ancaman yang cukup tinggi dan apabila ancaman tersebut benar benar terwujud maka akan sangat mengganggu stabilitas

keamanan di kawasan, terutama ancaman akan persenjataan nuklir yang dimilikinya. Ancaman ini bukan hanya menyebabkan kekhawatiran di negara negara sekitar saja, akan tetapi juga cukup menciptakan kekhawatiran semua pihak yang memiliki kepentingan di Semenanjung Korea. Usaha Korea Selatan untuk membina hubungan dengan Korea Utara selalu dijalankan dengan penuh pertimbangan, apalagi setelah Korea Selatan di bawah pemerintahan sipil yang demokratis. Tindakan persuasif adalah salah satu cara untuk dapat menciptakan suasana yang kondusif dan aman di kawasan. Kemampuan Korea Utara yang semakin menurun dalam segi perekonomian oleh karena ideologi dan sistem pemerintahan yang tidak mampu menghadapi globalisasi dunia dimanfaatkan oleh Korea Selatan. Kemiskinan, kelaparan, Kekurangan pangan, kekurangan energi, kesehatan yang tidak memadai, dan banyak lagi kekurangan yang dialami oleh rakyat Korea Utara dicoba dipenuhi oleh Korea Selatan dengan kemampuan pemerintah sendiri ataupun bekerjasama dengan swasta Korea Selatan. Bantuan finansial, bahan pangan, program pariwisata dan program program lainnya (termasuk juga pertemuan keluarga yang terpisah) diselenggarakan dengan tujuan awal untuk membantu rakyat Korea Utara yang menderita terjerat oleh sistem negaranya. Akan tetapi hal tersebut adalah sebuah bagian dari politik Matahari Bersinar yang dicanangkan di masa pemerintahan Kim Dae Jung. Dengan pendekatan yang bersifat kooperatif dan mencoba membantu kesulitan Korea Utara maka akan meredahnya ketegangan di kawasan Semenanjung Korea. Juru bicara kepresidenan Republik Korea mengatakan presiden Roh telah menegaskan lagi tujuan pemerintah untuk mempercepat kerjasama ekonomi dengan Selatan untuk mendirikan sebuah infrastruktur dan mencapai produktifitas industrinya.

Hal ini pasti akan membuka zaman baru pembangunan ekonomi dari negara yang semakin baik.⁷

Pendekatan dengan melakukan kebijakan kooperatif dengan Korea Utara semenjak Korea Selatan di bawah pemerintahan sipil juga membuahkan hasil yang positif terhadap hubungan bilateral kedua negara ataupun dengan peningkatan keamanan kawasan Semenanjung Korea.

Pendekatan kooperatif ini lebih diterima Korea Utara, hal ini terbukti dengan terwujudnya Konferensi Tingkat Tinggi Inter – Korea di tahun 2000, kemudian diikuti oleh Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) di berbagai bidang. Dan setelah memanasnya hubungan Korea Utara dengan Amerika Serikat Korea Utara kembali dapat menerima tawaran rekonsiliasi dari Korea Selatan, hal itu dapat dilihat dari kehadiran Ri Jong-hyok, Kepala Deputi Komite Perdamaian Korea Utara untuk Asia Pasifik yang memenuhi undangan presiden Roh Moo Hyun dalam peringatan empat tahun Pertemuan Tingkat Tinggi Korea 2000, dan kemajuan lainnya adalah peredaan ketegangan di garis DMZ. Peredaan ketegangan ini adalah ditandai dengan disepakatinya pelepasan semua alat alat propaganda milik kedua belah pihak yang ada di garis perbatasan demiliterisasi (DMZ). Tentara Korea Selatan melepas semua peralatan *sound System* dan *Speaker* ribuan watt yang selama ini digunakan untuk menyebarkan propaganda suara yang diarahkan ke arah tentara Korea Utara di seberang, tentara Korea Selatan juga melepas semua spanduk dan baliho besar yang bertuliskan doktrin doktrin kebebasan dan demokrasi yang dihadapkan ke arah seberang. Hal tersebut juga dilakukan sama oleh tentara tentara Korea Utara.⁸ Kemajuan lain dalam peredaan ketegangan setelah ketegangan antara Amerika Serikat dan Korea Utara di tahun 2002 adalah adanya kontak radio antara kapal perang Korea Utara dan Korea Selatan.

Hal ini tentunya sebuah kemajuan yang positif dalam peredaan ketegangan di Semenajung Korea. Kontak radio kedua kapal perang ini terjadi saat kedua kapal ini sedang patroli di perairan barat mengikuti garis NNL (*North Limit Line*). Kontak radio yang diikuti oleh komunikasi dengan sandi *Morse* ini berlangsung selama lima belas menit dan masing masing kapal menggunakan nama puncak gunung tertinggi di masing masing wilayahnya (Puncak gunung *Baekdu* di wilayah Korea Utara dan puncak gunung *Halla* di wilayah Korea Selatan).⁹

⁹Now Korea Magazine, *Op.Cit.*, hal 6 81

Dengan terciptanya suasana aman di kawasan Semenanjung Korea maka proses perekonomian kemudian dapat berjalan dengan baik dan mesin mesin perekonomian Korea Selatan dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Apabila perekonomian dapat berjalan dengan baik, tanpa ada gangguan ancaman keamanan dari kondisi politik yang tidak kondusif, maka Korea Selatan pun dapat mencapai cita cita nasionalnya yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat Korea Selatan.

